

## **PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL MODERATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK**

**Faisal, Yusri Hazmi, Ali Imran, & Aryati**  
**Politeknik Negeri Lhokseumawe Banda Aceh**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan survey terhadap seluruh populasi penelitian yang berada di DPRK Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang. Kemudian yang menjadi unit analisis adalah anggota dewan yang membidangi komisi anggaran. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuosioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ; pertama, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, kedua interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, dan ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci : Pengawasan keuangan daerah (APBD), pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik.

### **LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Dampak lain yang muncul dengan adanya otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi sangat penting dan tugasnya meningkat dalam

mengontrol kebijakan pemerintahan. Menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Disamping lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (*fungsi membuat peraturan perundang-undangan / legislasi*), 2) fungsi anggaran (*fungsi menyusun anggaran / Budgeting*), dan 3) fungsi pengawasan (*fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif / controlling*).

Dalam penelitian ini fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut lebih disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran ataukah disebabkan masalah lain. Disamping itu apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan kebijakan publik.

Dengan adanya transparansi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan pemerintah maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan *pro poor*, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktek KKN. Di samping itu dengan ditingkatkan transparansi publik dan partisipasi masyarakat maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*).

Begitu juga dengan kondisi yang terjadi di Aceh, khususnya di Kota Langsa dan Aceh Tamiang yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Semenjak di sahkannya UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah tentang Partai Lokal di Aceh dalam pemilu legislatif, maka telah terjadi perubahan dalam peta politik di Aceh, baik terhadap pemahaman peraturan maupun terhadap sebuah kebijakan yang akan dijalankan. Maka berdasarkan hal itulah perlu memberikan sebuah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya akuntansi sektor publik dan fungsi anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (*tupoksi*) legislatif.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah: 1) apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, dan 3) apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh pada tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat pada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, 3) untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik pada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Selain itu untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah di samping diperlukan pengawasan yang bersifat internal juga diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan secara internal selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, BPKP, serta DPR dan DPRD; sehingga akan diperoleh suatu laporan pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan prosedur *check and balances*. Dalam penelitian ini, proses pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPRD memiliki bagian khusus yang disebut Panitia Anggaran (*Panggar*).

Pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui *post audit* melalui pemeriksaan di tempat (Sopannah dan Mardiasmo, 2003).

### Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner dalam Zainuddin *et al.*, (2002). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun, serta dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan (Hopwood dalam Zainuddin *et al.*, (2002). Partisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut juga meningkatkan kinerja, sikap dan kepuasan kerja terhadap anggaran. Partisipasi dan pengaruh individual di dalam proses penganggaran merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajer di dalam pencapaian tujuan penganggaran.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2003) partisipasi di dalam penyusunan anggaran mempunyai efek yang positif, dengan alasan: 1) ada penerimaan yang lebih besar dari tujuan anggaran jika mereka merasa berada dalam pengendalian manajer, dibandingkan dengan adanya paksaan dari luar. Hal ini menuju kepada tanggung jawab individu untuk mencapai tujuan, dan 2) hasil partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif. Besarnya anggaran yang telah disetujui merupakan hasil kesepakatan antara ahli dan pembuat anggaran atau penyusun anggaran.

### Transparansi Kebijakan Publik

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi

secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (UU No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah).

Mengacu pada apa yang di sampaikan dalam UU No. 56 Tahun 2005 tersebut, tampak bahwa transparansi kebijakan khususnya kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, dalam rangka menuju pemerintahan yang baik.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

1. pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. partisipasi masyarakat mempengaruhi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. transparansi kebijakan publik mempengaruhi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang yang merupakan daerah pemekaran. Adapun Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh anggota "Komisi C (Bidang Perekonomian dan Keuangan) dan Komisi D (Bidang Anggaran)" dan seluruh Panitia Anggaran di DPRK Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Data sekunder tentang jumlah anggota DPRD kabupaten diperoleh dari sekretariat Dewan masing-masing. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 90 orang anggota dewan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei dengan menggunakan instrumen kuesioner, yang diisi oleh responden. Untuk melengkapi data agar komprehensif dan objektif dilengkapi dengan wawancara, dan observasi langsung ke lapangan. Data-data dalam penelitian ini harus diuji secara verifikatif oleh sebab itu jawaban deskriptif yang didapat oleh responden perlu diverifikatifkan terlebih dahulu dengan menggunakan *skala likert*. Skala likert adalah salah satu cara untuk menentukan skor dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memilih salah satu jawaban yang ada.

## Metode Analisa Data dan Pengujian Hipotesis

### Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) (Sharma, *et al.*, 1981). Maka model MRA yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X + b_2Z_1 + b_3Z_2 + b_4Z_1X + b_5Z_2X + e$$

keterangan :

Y	: Pengawasan Keuangan Daerah	$Z_1X$	: Interaksi antara $Z_1$ dengan X
X	: Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	$Z_2X$	: Interaksi antara $Z_2$ dengan X
		$Z_1Z_2X$	: Interaksi antara $Z_1$ , $Z_2$ dan X
$Z_1$	: Partisipasi Masyarakat	B	: Koefisien regresi
$Z_2$	: Transparansi Kebijakan Publik	E	: Tingkat error

### Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara data urut waktu (*time series*) atau antara space untuk data *cross section*. Keberadaan autokorelasi yang signifikan mengakibatkan parameter regresi menjadi tidak konsisten, meskipun tak biasa. Oleh karena itu, hasil regresi tidak boleh mengandung gejala autokorelasi yang signifikan.

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Watson Test*. Jika nilai statistik Durbin-Watson (DW) mendekati 2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi yang signifikan, Gujarati (2003).

### Pengujian Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah fenomena di mana pada nilai variabel independen tertentu, masing-masing kesalahan ( $e$ ) mempunyai nilai varian ( $\sigma^2$ ) yang tidak sama. Heteroskedastisitas ini mengakibatkan nilai-nilai estimator (koefisien regresi) dari model tersebut tidak efisien meskipun estimator tersebut tidak bias dan konsisten. Pengujian terhadap adanya fenomena heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *Spearman's Rank Correlation Test*.

### Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan standar parameter menjadi semakin besar. Hal ini boleh terjadi pada hasil analisis regresi. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode VIF (*Variance Inflation Factor*). Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian metode VIF ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003); Jika  $VIF > 10$  terjadi multikolinearitas tinggi antara regresor (variabel bebas) dengan regresor (variabel bebas) yang lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengetahuan Dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Model statistik penelitian untuk mengetahui hasil pengujian dalam penelitian ini

menggunakan model *moderated regression analysis* (MRA). Hal ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun bersama-sama (simultan). Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 17.

### Pengujian hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menguji pengaruh langsung pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Dewan tentang anggaran (PDTA) berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (PKD).

**Tabel 1**  
**Hasil Regresi Pengujian Hipotesis Pertama**

No	Keterangan	N	Adj R <sup>2</sup>	F-value	Sig	Koefisien	T-value	Sig
1	Sampel dewan	90	0.628	151,31	0,000			
2	Konstanta					31,389	12,617	0,000
3	Pengetahuan Dewan	90				1,013	12,301	0,000

Sumber ; Data Diolah

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis 1 pada tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasi (Adj R<sup>2</sup>) adalah 0,628 atau 62,8%. Artinya variabel bebas (PDTA) dalam model regresi mampu menjelaskan variabel terikat (PKD) sebesar 62,8% sedangkan sisanya sebesar 37,2% diperkirakan berasal dari variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,000, serta hubungan koefisien regresinya adalah 1,013. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 12,301 dengan sig 0,000. Jika dibanding sig 0,000 dengan  $\alpha$  (0,05) maka diperoleh sig < 0,05; dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,992) dan nilai dari F hitung sebesar 151,31 (> f tabel 1,583) dengan tingkat signifikan 0,000 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (PKD).

### Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut :

H2 :Partisipasi masyarakat tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

**Tabel 2**  
**Hasil Regresi Pengujian Hipotesis Kedua**

No	Keterangan	N	Adj R <sup>2</sup>	F-value	Sig	Koefisien	T-value	Sig
1	Sampel dewan	90	0.660	58,47	0,000			
2	Konstanta						3,394	0,001
3	Pengetahuan	90				-0,477	-0,819	0,415
4	Partisipasi	90				-1,597	-1,821	0,072
5	Interaksi pengetahuan dan partisipasi	90				2,609	2,034	0,045

Sumber ; Data Diolah

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke dua, pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 58,47 dan F tabel 2, 274 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Pada interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari nilai t hitung hasil regresi adalah 2,034 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (1,991), dan  $\text{sig } 0,045 < \alpha = 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

### Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan APBD yang dinyatakan sebagai berikut :

H3 : Transparansi Kebijakan Publik tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

**Tabel 3**  
**Hasil Regresi Pengujian Hipotesis Ketiga**

No	Keterangan	N	Adj R <sup>2</sup>	F-value	Sig	Koefisien	T-value	Sig
1	Sampel dewan	90	0.680	60,83	0,000			
2	Konstanta						5,037	0,000
3	Pengetahuan	90				-1,133	-2,073	0,041
4	Transparansi	90				-2,896	-3,567	0,001
5	Interaksi transp & partisipasi	90				3,801	3,558	0,001

Sumber ; Data Diolah

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ketiga, pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 60,83 dan F tabel 2,274 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan transparansi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Pada interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik dapat dilihat dari nilai t hitung hasil regresi adalah 3,558 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (1,991), dan  $\text{sig } 0,001 < \alpha = 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

### Pembahasan

#### Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,000 ( $< \alpha 0,05$ ). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif sebesar 1,013. Koefisien yang diperoleh bernilai positif maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Pengetahuan dewan

yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan pada saat penyusunan, deteksi terhadap kebocoran dan pemborosan serta identifikasi terhadap kebocoran dan pemborosan APBD.

Nilai  $t$  hitung dari hasil regresi adalah 12,301 dimana  $t$  hitung ini lebih besar dari  $t$  tabel (1,991), maka hipotesis pertama diterima. Dilihat dari  $F$  hitung sebesar 151,31 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh dibawah 0,05 dan koefisien regresinya positif dengan nilai 1,013 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah, atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### **Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengaruh antara pengetahuan Dewan tentang anggaran pada pengawasan keuangan daerah.**

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa Nilai  $F$  hitung sebesar 58,47 dan  $F$  tabel 2,74 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai  $t$  hitung dari hasil regresi adalah 2,034 dimana  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,045. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi dengan tanda (*sign*) adalah 2,609 dan nilai signifikan sebesar 0,045 sehingga hasil tersebut menerima hipotesis dua yang menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua.

#### **Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran pada pengawasan keuangan daerah.**

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa Nilai  $F$  hitung sebesar 60,83 dan  $F$  tabel 2,74 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai  $t$  hitung dari hasil regresi adalah 3,558 dimana  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,001. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 3,801 dan  $sig$  (0,000)  $< \alpha$  0,05 maka penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengaruh antara pengetahuan Dewan tentang anggaran pada pengawasan keuangan daerah.



## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.000 ( $< \alpha$  0,05) atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat.
2. Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,045 ( $< \alpha$  0,05) dengan koefisien regresinya bernilai negatif (2,609). Hal ini menunjukkan bahwa ketika dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat, stimuli yang diterima berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,001 ( $< \alpha$  0,05) dan koefisien regresi sebesar 3,801. Hal menunjukkan bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan publik, stimuli yang diterima berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony & Govindarajan. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Pramono, Agus H. 2002. Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, *Tesis S2* (Belum di Publikasikan), Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Sharma, S. Richard. M. Durand, and O. Gur-Arie. 1981. "Identification and Analysis of Moderator Variables", *Journal of Marketing Research*.
- Sopannah, dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Semarang.
- Zainuddin et al., 2002. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.